

## **MANFAAT PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) DI KANTOR CAMAT KECAMATAN MENDAHARA**

M. Akbar Marhafis<sup>1</sup>, Ahmad Edi Saputra<sup>5</sup>, Nurjali<sup>5</sup>

*Institut Islam Al-mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia*

*marhafis029@gmail.com*

### **Abstrak**

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Mendahara, telah menetapkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasaran dan memberikan dampak atau manfaat bagi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam peningkatan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder, meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menguraikan pelaksanaan program, distribusi, dan sejauh mana masyarakat Kecamatan Mendahara terdampak dan mendapat manfaat dari Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam waktu yang singkat, Bantuan Sosial Tunai (BST) terbukti membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat

**Kata Kunci:** *Manfaat, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kecamatan Mendahara*

### **PENDAHULUAN**

Semua negara, baik negara maju maupun berkembang, berjuang melawan kemiskinan, tetapi negara berkembang lebih terpengaruh karena lingkungan pembangunan mereka masih tidak stabil dan tidak berkelanjutan. Menurut (Al-arif, 2010), kemiskinan ditentukan oleh pendapatan dan kebutuhan dasar suatu negara, yang bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kemiskinan adalah masalah multidimensi, yaitu kondisi di mana hak-hak dasar individu atau sekelompok individu untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan yang layak tidak terpenuhi (Wibowo & Supriadi, n.d.).

Karena kemiskinan merupakan masalah dunia dan bukan hanya masalah Indonesia, organisasi internasional seperti Bank Dunia telah mengatakan dalam World Development Report on Poverty tentang Kemiskinan bahwa perjuangan melawan kemiskinan yang berhasil harus dilancarkan secara serentak di tiga Lokasi (Mankiw, 2012).

1. Ekspansi ekonomi yang meluas dan padat karya yang memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap pekerjaan dan uang.
2. pengembangan sumber daya manusia (gizi, kesehatan, dan pendidikan) yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan peluang yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi.
3. membangun jaring pengaman sosial bagi mereka yang tidak mampu, yang karena bencana sosial, bencana alam, atau gangguan fisik maupun mental, tidak mampu memanfaatkan peluang pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi.

Definisi kemiskinan nasional yang dibuat oleh BPS merupakan definisi yang sering digunakan di Indonesia, khususnya ketika menghitung kemiskinan di tingkat nasional. Metode kebutuhan dasar (*basicneeds approach*) digunakan oleh BPS untuk mendefinisikan

kemiskinan. Menurut metode ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, termasuk kebutuhan dasar akan makanan. (Abbas, 2022).

Penyebab utama kemiskinan meliputi kepadatan penduduk, distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup dan pengeluaran yang tinggi, kurangnya akses ke pendidikan yang baik dan prospek pekerjaan, serta degradasi lingkungan.

Penyebab dan akibat kemiskinan sering kali bekerja sama untuk menciptakan keadaan yang membuat individu tetap dalam kemiskinan. Kemajuan di masa depan dapat terhambat oleh kemiskinan, yang akan berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Saat ini, tantangan terbesar dunia adalah memberantas kemiskinan.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah penduduk miskin menurun antara tahun 2015 dan 2022, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2021. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 adalah 30.180 jiwa. Angka kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur turun dari 27.420 jiwa pada tahun 2016 menjadi 27.220 jiwa pada tahun 2017, 26.990 jiwa pada tahun 2018, 25.350 jiwa pada tahun 2019, dan 24.230 jiwa pada tahun 2020. Sedikit peningkatan menjadi 24.420 jiwa tercatat pada tahun 2021, dan kemudian berkurang 1.000 jiwa menjadi 23.420 jiwa pada tahun 2022. Sebaliknya, pendapatan rumah tangga berpendapatan rendah diperkirakan akan terus meningkat antara tahun 2016 dan 2022. sebesar Rp 322.389,- pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga mencapai Rp 468.201,- pada tahun 2022. Gambar 1 berikut menunjukkan perkembangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari tahun 2016 hingga tahun 2022.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	301 563	30,18	14,17
2016	322 389	27,42	12,76
2017	338 963	27,22	12,58
2018	361 574	26,99	12,38
2019	374 735	25,35	11,54
2020	392 778	24,23	10,95
2021	406 772	24,42	11,39
2022	468 201	23,42	10,91

Sumber: BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Ilzania et al., 2023)

Gambar 1. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2022

Karena mempunyai kepentingan yang mesti diakomodir agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi resiko sosial, dan membatasi kepentingan politik dalam arti luas, bantuan sosial (Bansos) banyak menyita perhatian masyarakat (Akba, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

32 tahun 2011 menyebutkan: “Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif, bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial” (Kemendagri, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian tentang sebaran manfaat (benefit incident) bantuan sosial di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tahun 2016, masyarakat miskin dan berisiko miskin telah merasakan manfaat bantuan sosial secara nasional. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian (Firmansyah & Solikin, 2019) yang menunjukkan bahwa bantuan sosial di Indonesia benar-benar progresif dan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun demikian, sejumlah program bantuan sosial masih memiliki kekurangan dan pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan ketentuan (Arfandi et al., 2022). Di tingkat daerah, jenis bantuan dan pola manfaatnya dapat berbeda-beda (Lanjouw & Pradhan, 2002).

Bantuan sosial tunai mencakup bantuan pangan, pendidikan, bantuan keuangan, subsidi listrik, bantuan pertanian, dan bantuan sosial lainnya yang disediakan pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah pusat untuk masyarakat meliputi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Sembako, Paket Sembako, dan Kartu Prakerja.

Program Bantuan Sosial Tunai di Kecamatan Mendahara sangat banyak pertanyaan dan permasalahan, apakah pemberian BST ini sudah tepat sasaran pelaksanaannya atau tidak. Dan apakah dengan pemberian BST ini sudah memberikan mafaat kepada Masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menilai Manfaat Pengelolaan Bantuan Dan Sosial Di Kantor Camat Kecamatan Mendahara. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan tersebut melalui penilaian dampak dan efektivitas Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan serta distribusi manfaat program BST.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara metodis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lapangan, berdasarkan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Terkait dengan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkarakterisasi, mendokumentasikan, menguji, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi (Mardalis, 2003). Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Kantor Camat Mendahara.

Selanjutnya, data dari hasil penelitian yang berupa teori akan dihubungkan dengan penafsiran data yang ditemukan di lokasi penelitian. Triangulasi digunakan untuk melakukan metode pengumpulan data yang meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh tidak secara langsung melalui media perantara. Data sekunder berasal dari catatan, orang lain, dan sumber lain, bukan dari

pengumpul data secara langsung. Penelitian ini menggunakan buku, laporan, data statistik, literatur, jurnal, dan sumber sekunder lainnya (Prastowo, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara geografis, Kecamatan Mendahara terletak di muara Sungai Batanghari. Oleh karena itu, Kecamatan Mendahara merupakan daerah muara, yaitu tempat bertemunya air sungai dan air laut. Mendahara Ilir merupakan salah satu Kecamatan di Kecamatan Mendahara yang luas wilayahnya 10,59% dari wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan memiliki luas wilayah 538,58 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kecamatan Mendahara sebanyak 26.902 jiwa dengan kepadatan 49,53 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Mendahara membawahi 9 kelurahan yaitu: Mendahara Ilir, Sinar Kalimantan, Pangkal Duri, Mendahara Tengah, Sungai Tawar, Bhakti Idaman, Merbau, Lagan Ilir, dan Pangkal Duri Ilir (Tanjung Jabung Timur, 2022).

### **Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Kementerian Sosial menyediakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan kepada masyarakat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Seseorang, keluarga, kelompok, atau Masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau terancam resiko sosial dapat memperoleh bantuan dalam bentuk uang tunai, barang, atau layanan dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara wajar (Effendy, 2020). Bantuan Sosial Tunai (BST) juga merupakan penyaluran uang atau barang yang diberikan kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menjaga dari potensi bahaya sosial.

Program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan terdampak kondisi sosial ekonomi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Bantuan Sosial Tunai (BST), yaitu program yang membantu masyarakat miskin, kehilangan pekerjaan, dan penyandang disabilitas, merupakan salah satu contohnya (Kartasasmita, 2019).

### **Proses Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Mendara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.**

Sasaran utama penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program yang dirancang untuk membantu program pemulihan ekonomi bagi mereka yang dianggap miskin dan mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi masyarakat yang berhak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) guna mencapai sasaran tersebut.

Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggunakan metode pendataan pengguna Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai berikut (Ansharuddin, 2020):

- 1) Melakukan pendaftaran dengan sejumlah syarat dan ketentuan di kantor desa/kecamatan setempat.
- 2) Camat meneruskan data yang masuk ke Bupati

- 3) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan konfirmasi dan autentikasi terhadap data yang diterima Bupati. Tidak semua usulan dapat diterima dan dimasukkan ke dalam DTKS berdasarkan informasi hasil verifikasi dan validasi.
- 4) Bupati melalui Gubernur menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Kementerian Sosial.
- 5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.

Pemerintah memberikan bantuan sosial tunai (BST) kepada keluarga miskin dalam bentuk uang atau barang kebutuhan pokok untuk meringankan masalah ekonomi mereka atau Masyarakat yang memiliki kartu PKH.

Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan rumah tangga berpendapatan rendah yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak tercatat tetapi memenuhi kriteria, yaitu tidak memiliki kartu prakerja, PKH, atau BPNT, kehilangan sumber penghasilan, dan memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis.

Untuk mengambil Bantuan Sosial Tunai (BST), masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau agen BRI Link yang ditunjuk oleh pemerintahan dan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan, seperti PKH atau kartu merah. Dengan menunjukkan kartu, masyarakat sebagai KPM BST mendatangi kantor desa/kecamatan atau agen terdekat. Petugas kemudian akan mencairkan uang tersebut.

Untuk mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST), masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan atau agen BRI Link yang ditunjuk oleh pihak pemerintah setempat dengan menunjukkan kartu merah atau PKH atau dengan menunjukkan kartu miliknya sebagai KPM BST mendatangi kantor desa/kecamatan atau agen terdekat. Petugas kemudian akan mencairkan uang.

### **Pengaruh/Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**

Tingkat kemiskinan seharusnya berdampak langsung pada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Idealnya, jumlah Bantuan Sosial Tunai (BST) daerah bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin (Yunia & Wardhana, 2023). Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Mendahara cukup banyak, terbukti dari tingkat kemiskinan dan keluarga penerima manfaat (KPM) BST pada tahun 2020. Tercatat sebanyak 681 KPM BST telah diberikan pada tahap I kepada 26.902 warga Kecamatan Mendahara di Kecamatan tersebut pada tahun 2020.

REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN TUNAI PUSAT (BST) COVID 19 KECAMATAN MENDAHARA TAHUN 2020							
No	Desa/Kelurahan	Tahap Penyaluran					Keterangan
		I	II	III	IV	V	
1	Mendahara Ilir	157	135	124	84	84	
2	Sinar Kalimantan	79	79	66	51	51	
3	Pangkal Duri	74	60	60	40	40	
4	Mendahara Tengah	104	79	79	67	67	
5	Sungai Tawar	15	15	15	6	6	
6	Bhakti Idaman	54	54	54	27	27	
7	Merbau	87	71	71	45	45	
8	Lagan Ilir	36	31	31	31	31	
9	Pangkal Duri Ilir	75	72	69	54	54	
	<b>Jumlah</b>	<b>681</b>	<b>596</b>	<b>569</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	

Gambar 2. Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Tunai Pusat (BST) Kecamatan Mendahara Tahun 2020

Mencermati kondisi serta berdasarkan data rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kecamatan Mendahara dengan rincian penyaluran di 9 kelurahan pada tahun 2020, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

Pertama, sebaran angka kemiskinan di Kecamatan Mendahara tidak atau belum menunjukkan pola yang sama dengan sebaran porsi Bantuan Sosial Tunai (BST) di sembilan kecamatan. Porsi Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diberikan oleh pemerintah ke kecamatan/desa tidak diikuti oleh persentase penduduk miskin yang tinggi. Hal ini terjadi karena belum terdapat kebijakan penetapan porsi Bantuan Sosial Tunai (BST) Kecamatan Mendahara.

Kedua, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) Kecamatan Mendahara tahun 2020 dipecah menjadi lima termin, dengan penurunan KPM BST di setiap desa atau kelurahan. Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan pada tahun 2020 untuk membantu masyarakat setempat dalam menghadapi krisis ekonomi akibat COVID-19. Hal ini memungkinkan masyarakat dan warga yang terdampak dan berisiko terhadap resiko sosial untuk tetap bertahan hidup. Anggaran (variabel) atau nominal Bantuan Sosial Tunai (BST) Kecamatan Mendahara yang terus menurun menjadi penyebab penurunan peserta BST pada setiap termin tahun 2020.

Ketiga, meskipun kriteria pengguna Bantuan Sosial Tunai (BST) ditetapkan dengan membandingkan tingkat kemiskinan dengan jumlah BST yang dibatasi dan semakin menurun menunjukkan bahwa kecamatan mendahara yang menjadi penanggungjawab penyebaran Bantuan Sosial Tunai (BST) mengutamakan masyarakat miskin yang masuk kategori kemiskinan ekstrem atau sangat terdampak.

Selain itu, persyaratan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) juga diperluas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa wajib menerapkan standar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kecamatan Mendahara, dengan prioritas diberikan kepada rumah tangga miskin yang masuk dalam garis kemiskinan ekstrem.
- 2) Hilangnya pendapatan
- 3) Memiliki keluarga yang rentan sakit dalam jangka panjang.
- 4) Masyarakat miskin penerima berbagai jaring pengaman sosial dari APBD dan/atau APBN yang telah dihentikan penyalurannya.
- 5) Masyarakat miskin terdampak wabah COVID-19 yang belum mendapatkan bantuan.
- 6) Keluarga dengan lansia yang tinggal sendiri.

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka perundang-undangan dan standar yang berlaku, memberikan manfaat yang tepat, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semua pemangku kepentingan terkait tetap harus berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal penyadaran KPM. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) memberikan bantuan keuangan serta berbagai kebutuhan pokok. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran biaya hidup. Tentunya, diperlukan pengetahuan KPM untuk mendukung pencapaian tersebut, termasuk mengelola ekonomi keluarga seefektif mungkin dalam upaya memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) masih banyak menemui kendala, terutama di masa pandemi, yang menyebabkan efektivitas penyaluran BST menjadi kurang maksimal. Kendala pertama adalah ketidakakuratan data statistik pengguna Bantuan Sosial Tunai (BST). Ketidakakuratan data menjadi kendala yang umum terjadi dalam penyaluran bantuan sosial. Ketidakakuratan data tersebut diduga disebabkan oleh beberapa variabel, antara lain belum semua Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, proses validasi dan verifikasi data masih lamban dan belum optimal. Akibatnya, basis data penerima bantuan sosial kini mencakup kategori Masyarakat miskin yang sebelumnya tidak termasuk. Akhirnya, masyarakat dalam kelompok ini tidak mendapatkan bantuan sosial.

Kedua, sumber daya yang digunakan untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) belum mengalami perubahan sesuai dengan situasi terkini. Kondisi saat ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang tidak dapat diprediksi, seperti halnya pandemi. Untuk mengatasinya, diperlukan penanganan yang cepat dan akurat, terutama dalam hal pemutakhiran data dan perluasan target pengguna Bantuan Sosial Tunai (BST). Pemutakhiran data membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Meskipun tidak semua pemerintah daerah secara aktif mendorong pemutakhiran data, banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia untuk tugas ini.

Ketiga, pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) saat ini masih minim. Sebagian besar kekhawatiran masyarakat terkait ketimpangan penyaluran bantuan sosial selama proses penyaluran berpusat pada lima hal, yaitu waktu, sasaran

penerima manfaat, lokasi penyaluran, serta persyaratan dan proses yang membingungkan untuk memperoleh bantuan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan penyaluran secara bertahap, dimulai dari penyempurnaan sistem pendataan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Pertama, seluruh data masyarakat dalam sistem DTKS Kementerian Sosial yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan memiliki satu identitas dan NIK yang sesuai dengan data kependudukan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Kedua, penyiapan sumber daya pendukung dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Diperlukan sumber daya yang tepat dan cepat untuk mendukung mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tersebut, pemerintah harus menyiapkan dana. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

Jika melihat bagaimana pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan kaitannya dengan peningkatan ekonomi daerah, pemerintah masih perlu melakukan perluasan atau pengembangan. Hal ini disebabkan karena besaran nominal bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tingginya biaya bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Alhasil, hal ini mempengaruhi dampak Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dinilai belum memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jika berbicara mengenai upaya cepat meringankan beban kebutuhan masyarakat, Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih tepat.

## **KESIMPULAN**

Berikut ini adalah beberapa disimpulkan yang diperoleh yang sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam kajian penulis tentang manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat:

1. Program Bantuan Sosial Tunai (BST) tepat sasaran bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum dan pedoman yang berlaku, serta siap untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Sekalipun pelaksanaan dan manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST) dikaitkan dengan peningkatan ekonomi daerah, pemerintah masih perlu melakukan penyesuaian atau membuat terobosan baru di bidang ini. Hal ini dikarenakan jumlah nominal yang diberikan dengan jumlah Masyarakat yang masuk kategori miskin atau terdampak masih belum berjalan beriringan. Namun, Bantuan Sosial Tunai (BST) telah bermanfaat untuk meringankan beban kebutuhan Masyarakat dalam kurung waktu singkat. KPM mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban biaya dengan mengubah pola pikir mereka untuk mengendalikan keuangan yang diberikan semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2022). Strategi Bantuan Sosial Tunai (BST) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. In *Braz Dent J.* (Vol. 33, Issue 1).
- Akba, A. (2019). Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin. *HUMANIS : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 72–89. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>
- Al-arif, M. N. R. (2010). *Lokasi: Teori Makro Ekonomi Islam : Konsep, Teori Dan Analisis*. Alfabeta. <https://onsearch.id/Record/IOS13516.INLIS000000000000532>
- Ansharuddin, H. (2020). *No 37 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai*. 1–9.
- Arfandi, R. Z., Studi, P., Pembangunan, E., Trisakti, U., Studi, P., Ekonomi, I., & Trisakti, U. (2022). DAMPAK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP Program Utama Bansos di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(1), 1–15.
- Effendy, M. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*. 11.
- Firmansyah, A. D., & Solikin, A. (2019). Who Gains From Social Assistances? Rastra, Pip, and Pkh Programs in Indonesia. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 53–70. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.372>
- Ilzania, K. A., Fitriyani, A., & Anggara, F. S. (2023). Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Angka. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Vol. 16, Issue 1). <https://doi.org/10.25104/mtm.v16i1.840>
- Kartasmita, A. G. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Kemendagri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011*. 53(9).
- Lanjouw, P., & Pradhan, M. (2002). Poverty, education and health in Indonesia: Who benefits from public spending? *Education and ...*, i, 1–63. [http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cyCVZV5ZjE4C&oi=fnd&pg=PA17&dq=Poverty+,+Education+and+Health+in+Indonesia+:+Who+Benefits+from+Public+Spending+?&ots=KSZA\\_8\\_FwS&sig=pm-ZQ0xaGSR8aVKpYYpktE7ANeU](http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=cyCVZV5ZjE4C&oi=fnd&pg=PA17&dq=Poverty+,+Education+and+Health+in+Indonesia+:+Who+Benefits+from+Public+Spending+?&ots=KSZA_8_FwS&sig=pm-ZQ0xaGSR8aVKpYYpktE7ANeU)
- Mankiw, N. G. (2012). *Pengantar ekonomi makro*. Salemba. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1186872>
- Mardalis. (2003). Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Proposal). *Jakarta : Bumi Aksara, Penelitian, Metode*, 42. [https://books.google.com/books/about/Metode\\_penelitian.html?hl=id&id=UtbSAAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Metode_penelitian.html?hl=id&id=UtbSAAACAAJ)

- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Cet. 3). Ar-ruzz Media.
- Tanjung Jabung Timur, B. (2022). Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Timur*, 6.
- Wibowo, S., & Supriadi, D. (n.d.). *Ekonomi mikro islam*. Pustaka Setia. Retrieved October 17, 2024, from <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200784/ekonomi-mikro-islam>
- Yunia, E., & Wardhana, A. (2023). Peran Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 6(2), 762–771.